

Jumlah, Jenis, Gambaran Umum Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta Laporan Penindakannya 2023-2024

A. Rekomendasi dan Temuan Hasil Pengawasan Internal APIP Tahun 2023 dan 2024

1. Audit Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan ketaatan pada 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja dengan total temuan sebanyak 262 dan rekomendasi sebanyak 504. Adapun rincian jumlah temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Ketaatan Tahun 2023

NO.	SATUAN KERJA	TEMUAN	REKOMENDASI	NILAI TEMUAN (Rp)
1.	IPDN JATINANGOR	20	49	Rp2.420.625
2.	PEMDES	17	33	Rp10.830.000
3.	IPDN KALBAR	15	29	Rp0
4.	IPDN SUMBAR	13	30	Rp12.637.478
5.	IPDN NTB	13	22	Rp5.850.031
6.	BPD LAMPUNG	12	17	Rp0
7.	IPDN PAPUA	12	22	Rp91.183.879
8.	BBPD MALANG	11	15	Rp0
9.	IPDN SULSEL	11	19	Rp5.289.600
10.	SETJEN	10	24	Rp34.634.980
11.	PPSDM YOGYAKARTA	10	17	Rp0
12.	PPSDM MAKASSAR	10	20	Rp14.000.000
13.	IPDN SULUT	10	18	Rp0
14.	BNPP	10	19	Rp9.170.850
15.	POLPUM	9	18	Rp13.270.900
16.	BANGDA	9	19	Rp28.835.000
17.	PPSDM BUKIT TINGGI	8	13	Rp0
18.	IPDN JAKARTA	8	14	Rp5.346.552
19.	BPD YOGYAKARTA	7	11	Rp0
20.	BPK SATPOL PP & DAMKAR	7	16	Rp5.060.630
21.	DKPP	7	8	Rp0
22.	DUKCAPIL	6	8	Rp0
23.	OTDA	5	10	Rp0
24.	KEUDA	5	13	Rp0
25.	BSKDN	4	9	Rp0
26.	BPSDM	4	9	Rp0
27.	ITJEN	4	10	Rp6.100.000

28.	PPSDM BANDUNG	3	10	Rp16.169.818
29.	ADWIL	2	2	Rp0
Total		262	504	Rp260.800.344,97

Sumber: Aplikasi SIWASIAT

2. Tindak Lanjut Audit Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Untuk Pemeriksaan Ketaatan di lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023, sampai dengan tanggal 12 September 2024 masih terdapat 214 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dari total 504 rekomendasi atau 42,46%, dengan sisa setoran keuangan senilai Rp159.042.695 dari total setoran senilai Rp260.800.343 atau 60,98%. Berikut tabel rekapitulasi data tindak lanjut untuk pemeriksaan ketaatan Tahun 2023

Tabel 2
Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan Tahun 2023

NO.	SATUAN KERJA	REKOM	TINDAK LANJUT							
			S	BS	BD	TPTD	NILAI (RP)	SETOR (RP)	SISA (RP)	%
1.	SETJEN	24	24	0	0	0	34.634.980	34.634.980	0	
2.	POLPUM	18	16	2	0	0	13.270.900	12.523.278	747.622	
3.	ADWIL	2	1	1	0	0	0	0	0	
4.	OTDA	10	7	3	0	0	0	0	0	
5.	BANGDA	19	13	6	0	0	28.835.000	7.125.000	21.710.000	
6.	KEUDA	13	11	2	0	0	0	0	0	
7.	DUKCAPIL	8	0	0	8	0	0	0	0	
8.	BSKDN	9	9	0	0	0	0	0	0	
9.	PEMDES	33	22	10	1	0	10.830.000	5.400.000	5.430.000	
10.	BBPD MALANG	15	13	2	0	0	0	0	0	
11.	BPD YOGYAKARTA	11	11	0	0	0	0	0	0	
12.	BPD LAMPUNG	17	17	0	0	0	0	0	0	
13.	BPSDM	9	3	2	4	0	0	0	0	
14.	PPSDM BUKITTINGGI	13	11	2	0	0	0	0	0	
15.	PPSDM YOGYAKARTA	17	0	0	17	0	0	0	0	

16.	PPSDM BANDUNG	10	10	0	0	0	16.169.818	16.169.818	0	
17.	PPSDM MAKASSAR	20	9	11	0	0	14.000.000	13.810.000	190.000	
18.	BALAI PK SATPOL PP DAMKAR	16	15	1	0	0	5.060.630	0	5.060.630	
19.	IPDN JATINANGOR	49	37	8	4	0	2.420.625	0	2.420.625	
20.	IPDN SULUT	18	0	0	18	0	0	0	0	
21.	IPDN SULSEL	19	0	19	0	0	5.289.600	0	5.289.600	
22.	IPDN SUMBAR	30	15	9	6	0	12.637.478	0	12.637.478	
23.	IPDN NTB	22	13	8	1	0	5.850.031	0	5.850.031	
24.	IPDN KALBAR	29	0	0	29	0	0	0	0	
25.	IPDN PAPUA	22	11	4	7	0	91.183.879	0	91.183.879	
26.	IPDN JAKARTA	14	14	0	0	0	5.346.552	5.346.552	0	
27.	ITJEN	10	1	9	0	0	6.100.000	0	6.100.000	
28.	BNPP	19	7	10	2	0	9.170.850	6.748.020	2.422.830	
29.	DKPP	8	0	0	8	0	0	0	0	
Total		504	290	109	105	0	260.800.343	101.757.648	159.042.695	

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, *cut-off* 12 September 2024

Keterangan:

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BD : Belum Ditindaklanjuti

TPTD: Tidak Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

3. Audit Kinerja Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Audit Kinerja pada unit kerja eselon I Kemendagri dan BNPP dilakukan berbasis risiko. Perhitungan risiko memperhatikan hasil *risk register* (60%) dan faktor serta bobot risiko (40%) yang perhitungannya sudah dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahun 2023. Audit Kinerja juga dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan menurut program strategis dari masing-masing Unit Kerja. Berikut jumlah temuan dan rekomendasi audit kinerja pada Kemendagri dan BNPP:

Tabel 4
Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Kinerja Tahun 2023

NO.	SATUAN KERJA	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	DKPP	10	18
2.	BNPP	6	16
3.	IPDN JATINANGOR	5	9
4.	BSKDN	4	4
5.	ADWIL	3	4
6.	KEUDA	3	12
7.	ITJEN	3	3
8.	POLPUM	2	4
9.	BANGDA	2	6
10.	DUKCAPIL	2	4
11.	OTDA	1	5
12.	PEMDES	1	5
13.	BPSDM	1	2
14.	SETJEN	-	-
Total		43	92

Sumber: Aplikasi SIWASIAT

4. Tindak Lanjut Audit Kinerja Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Untuk Pemeriksaan Kinerja di lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023, sampai dengan tanggal 12 September 2024 masih terdapat 81 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dari total 92 rekomendasi atau 88,04%. Berikut tabel rekapitulasi data tindak lanjut untuk pemeriksaan kinerja tahun 2023.

Tabel 5
Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2023

NO.	SATUAN KERJA	REKOM	TINDAKLANJUT				
			S	BS	BD	TPTD	%
1.	DKPP	18	0	0	18	0	0%
2.	BNPP	16	0	0	16	0	0%
3.	IPDN JATINANGOR	9	0	5	4	0	0%
4.	BSKDN	4	1	3	0	0	25%

5.	ADWIL	4	4	0	0	0	100%
6.	KEUDA	12	0	0	12	0	0%
7.	ITJEN	3	0	3	0	0	0%
8.	POLPUM	4	0	0	4	0	0%
9.	BANGDA	6	1	5	0	0	16,7%
10.	DUKCAPIL	4	0	0	4	0	0%
11.	OTDA	5	0	0	5	0	0%
12.	PEMDES	5	5	0	0	0	100%
13.	BPSDM	2	0	2	0	0	0%
14.	SETJEN	-	-	-	-	-	-
Total		92	11	18	63	0	12%

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, *cut-off* 12 September 2024

5. Audit Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (Siwasiat) sampai dengan tanggal 12 September 2024 terdapat 28 temuan pada 3 Satuan Kerja yang telah dilakukan audit ketaatan.

Tabel 3

Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Ketaatan Tahun 2024

NO.	SATUAN KERJA	TEMUAN	REKOMENDASI	NILAI TEMUAN (Rp)
1.	IPDN SUMBAR	11	19	Rp500.000
2.	IPDN KALBAR	9	17	Rp0
3.	IPDN PAPUA	8	14	Rp107.672.435
4.	SETJEN	-	-	-
5.	POLPUM	-	-	-
6.	ADWIL	-	-	-
7.	OTDA	-	-	-
8.	BANGDA	-	-	-
9.	KEUDA	-	-	-
10.	DUKCAPIL	-	-	-
11.	BSKDN	-	-	-
12.	PEMDES	-	-	-
13.	BBPD MALANG	-	-	-
14.	BPD YOGYAKARTA	-	-	-
15.	BPD LAMPUNG	-	-	-
16.	BPSDM	-	-	-
17.	PPSDM BUKITTINGGI	-	-	-

18.	PPSDM YOGYAKARTA	-	-	-
19.	PPSDM BANDUNG	-	-	-
20.	PPSDM MAKASSAR	-	-	-
21.	BALAI PK SATPOL PP DAMKAR	-	-	-
22.	IPDN JATINANGOR	-	-	-
23.	IPDN SULUT	-	-	-
24.	IPDN SULSEL	-	-	-
25.	IPDN NTB	-	-	-
26.	ITJEN	-	-	-
27.	BNPP	-	-	-
28.	DKPP	-	-	-
Total		28	50	Rp108.172.435

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, *cut-off* 12 September 2024

6. Tindak Lanjut Audit Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

Untuk Pemeriksaan Ketaatan di lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2024, sampai dengan tanggal 12 September 2024 belum ada progres tindak lanjut dikarenakan laporan hasil pengawasan baru disampaikan kepada satuan kerja yang dilakukan pemeriksaan.

7. Audit Kinerja Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan kinerja pada 14 (empat belas) Satuan Kerja namun sampai dengan tanggal 12 September 2024 baru terdapat 1 Satuan Kerja yaitu BPSDM yang sudah terinput dalam aplikasi Siwasiat dengan 5 temuan dan 13 rekomendasi.

8. Tindak Lanjut Audit Kinerja Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

Untuk Pemeriksaan Kinerja di lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2024, sampai dengan tanggal 12 September 2024 belum ada progres tindak lanjut dikarenakan laporan hasil pengawasan baru disampaikan kepada satuan kerja yang dilakukan pemeriksaan.

Jumlah, Jenis, Gambaran Umum Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta Laporan Penindakannya 2023-2024

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam hal ini melaksanakan tindak lanjut setiap pengaduan masyarakat yang merupakan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah pusat dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu berupa penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai.

Dari hasil pengadministrasian surat pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Jenderal Kemendagri sejak tahun 2023 s.d. 2024. Hasil inventarisasi pengelolaan pengaduan selama 2023 s.d 2024 (per tanggal 10 September 2024) sebanyak 1.069 (seribu enam puluh sembilan) pengaduan. Sebanyak 1.069 pengaduan dimaksud, telah diverifikasi untuk dilakukan penanganan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengaduan Tahun 2023 : 576 Pengaduan
 - a. Jenis Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Pengaduan Berkadar Pengawasan : 576 Pengaduan
 - a) penyalahgunaan jabatan/wewenang : 115 Pengaduan
 - b) pelanggaran administratif : 331 Pengaduan
 - c) korupsi, kolusi, dan nepotisme : 54 Pengaduan
 - d) pelanggaran disiplin pegawai : 76 Pengaduan
 - b. Laporan Penindakan terdiri dari:
 - 1) Tindak Lanjut : 203 Pengaduan
 - a) koordinasi : 27 Pengaduan
 - b) pelimpahan : 58 Pengaduan
 - c) klarifikasi : 33 Pengaduan
 - d) pemeriksaan khusus : 10 Pengaduan
 - e) arsip : 75 Pengaduan
 - 2) Masih Penelaahan : 373 Pengaduan
2. Jumlah Pengaduan Tahun 2024 : 493 Pengaduan
 - a. Jenis Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Pengaduan Berkadar Pengawasan : 282 Pengaduan
 - a) penyalahgunaan jabatan/wewenang : 46 Pengaduan
 - b) pelanggaran administratif : 121 Pengaduan
 - c) korupsi, kolusi, dan nepotisme : 25 Pengaduan
 - d) pelanggaran disiplin pegawai : 90 Pengaduan
 - 2) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan : 211 Pengaduan
 - a) aspirasi : 51 Pengaduan
 - b) tembusan : 156 Pengaduan
 - c) tindak lanjut pelimpahan : 4 Pengaduan
 - b. Laporan Penindakan terdiri dari:
 - 1) Tindak Lanjut : 148 Pengaduan
 - a) koordinasi : 24 Pengaduan
 - b) pelimpahan : 35 Pengaduan

c) klarifikasi	: 14 Pengaduan
d) pemeriksaan khusus	: 6 Pengaduan
e) arsip	: 69 Pengaduan
2) Masih Penelaahan	: 345 Pengaduan